BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka BPOM secara umum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, perdata, dan pidana atas kasus dalam pengawasan peredaran obat yang mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Secara administratif, BPOM dapat dituntut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas keputusan atau tindakan yang merugikan masyarakat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain tanggung jawab administratif, BPOM juga dapat dituntut secara perdata oleh korban atau keluarga korban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mengharuskan pihak yang bersalah untuk memberikan ganti rugi. Sedangkan untuk pidana, KUHP memberikan penjelasan bahwa badan publik tidak dapat dipidana secara langsung. Namun, Pejabat yang terkait kasus tersebut apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan pengambilan kebijakan, maka dapat dipidana melalui kamar hukum pengadilan umum. BPOM dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bahwa kelalaian dalam pengawasan obat telah menyebabkan kematian atau cedera serius. Sesuai dengan Pasal 359 KUHP, barang siapa yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, dapat dipidana dengan hukuman penjara atau denda.

1.2 Saran

Saran untuk BPOM selaku institusi pemerintah dalam bidang pengawasan obat beredar adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan dengan melakukan inspeksi yang lebih ketat dan berkala terhadap seluruh produk farmasi di pasaran. BPOM perlu memastikan bahwa seluruh bahan baku yang digunakan dalam produksi obat telah memenuhi standar keamanan dan tidak mengandung zat berbahaya. Selain itu, BPOM harus lebih transparan dalam menginformasikan hasil temuan inspeksi kepada publik agar masyarakat lebih waspada.

Bagi perusahaan farmasi, maka harus lebih taat mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh BPOM dan memastikan bahwa seluruh proses produksi obat dilakukan dengan standar yang tinggi. Perusahaan harus bertanggung jawab dalam melakukan uji laboratorium yang ketat terhadap bahan baku dan produk jadi sebelum diedarkan.

Kepada masyarakat, disarankan untuk selalu berhati-hati dan teliti dalam memilih produk obat, terutama untuk anak-anak. Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya memeriksa izin edar obat serta kandungan bahan aktif di dalamnya. Jika ditemukan ketidakjelasan atau informasi yang mencurigakan, sebaiknya segera menghubungi pihak berwenang atau dokter.